

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Mengevaluasi koordinasi para pelaku kemanusiaan seputar respon mereka dalam tsunami pada Desember 2004, menghasilkan suatu kesempatan untuk mencerminkan pencapaian dan perilaku sistem tanggapan secara internasional, ketika, tidak biasanya, sumber daya keuangan bukanlah suatu batasan. Tinjauan ulang Tanggapan Kemanusiaan secara global (HRR) dan GHD menyediakan suatu latar belakang penting dan fokus untuk analisa tersebut.

Evaluasi ini meliputi tiga negara: Indonesia, Sri Lanka dan Maldives, dengan beberapa pengamatan tambahan dari Thailand. Suatu regu yang terdiri dari 4 orang, ditambah satu orang konsultan nasional (Sri Lanka) mengunjungi masing-masing negara selama September-November 2005. Dengan tambahan pelatihan stakeholder dan wawancara dari markas-markas besar, banyaknya orang-orang yang berkonsultasi melewati 350 orang. Penghubungan TEC local dan Regu Evaluasi Kapasitas Nasional mencakup pertanyaan koordinasi dalam survei dimana populasi memiliki pengaruh, dan penemuan ditampilkan di sini.

Pengevaluasian berpusat pada efisiensi, efektivitas, hubungan dan kepastian pengaturan koordinasi di dalam sistem kemanusiaan internasional dan bagaimana ini berhubungan dengan pemerintahan nasional dan agen non pemerintahan. Analisa tersebut digambarkan berdasarkan suatu definisi pekerjaan secara koordinasi dimana alat-alat dan sistem nya, berwujud dalam delapan tema:

1. Kepemimpinan dan pengaturan badan perwakilan.
2. Negosiasi dan pemeliharaan suatu kerangka dapat diperbaiki dengan politik otoritas tuan rumah
3. Promosi divisi fungsional dari tenaga kerja ( mencakup sipil- militer)
4. Perencanaan strategis
5. Pengerahan sumber daya untuk pemograman yang terintegrasi
6. Pengumpulan data dan pengaturan informasi
7. Pertanggung-jawaban ( mencakup pertanggung jawaban kepada penerima populasi)
8. Advokasi/pembelaan bersama

Walaupun tanggapan tersebut menjadi suatu usaha internasional yang sangat besar, karakteristiknya lebih ditentukan oleh ciri khas dari tiap negara yang terkena tsunami. Ada sedikit perselisihan bahwa tsunamilah yang mempercepat proses perdamaian di Indonesia. Sayangnya, kesempatan yang sama tidak berlaku di Sri Lanka dimana, terjadi diantara perjanjian kerjasama awal dan peperangan antar fraksi dan hak kekayaan distribusi yang diusulkan di bawah prakarsa P-TOMS- konflik berkepanjangan disana.

Pengkoordinasian di Maldives menguntungkan dari angka-angka para agen yang relative kecil dan menutup dekatnya dari kantor mereka; sebagai pembanding, Indonesia dan Sri lanka menderita karena pemecahan yang disebabkan oleh penyebaran geografis dan pengaturan operasi-operasi oleh ratusan agen/perantara pada bulan pertama setelah bencana tsunami.

#### KEPEMIMPINAN DAN PENYAJIAN

Dalam suatu peristiwa berlevel tinggi, UN Koordinator Khusus dan ( segera setelah itu) UN Duta Khusus sangat penting berperan sebagai katalisator, advokat dan titik-api dalam membawa pengaruh terhadap pemerintahan dan masyarakat akan bantuan yang lebih luas secara bersamaan. Bagaimanapun, evaluasi ini menemukan suatu kebutuhan untuk hubungan yang lebih besar pada pertanggung jawaban dalam melaporkan dan mengambil keputusan di dalam berbagai tingkatan koordinasi, untuk menghindari pengaturan waktu- mengkonsumsi mikro- dan permintaan informasi yang sangat besar untuk dikirim ke New York dan Geneva- suatu permasalahan yang sering di hadapi responden UN di lapangan dalam pengevaluasian.

Dipandang dari sudut diskusi yang sekarang ini sedang berlangsung di HRR, imbas tsunami kembali menyoroti kebutuhan akan suatu struktur koordinasi yang lebih dapat diramal dan terpusat di lapangan dibawah instruksi IASC. Hasil evaluasi menemukan bahwa IASC itu, disamping berperan untuk memonitor keadaan dilapangan, tidak cukup menggambarkan, maupun berbicara atas nama, NGO yang memiliki perbedaan yang sangat besar, termasuk relawan nasional. Kelompok-kelompok yang dipayungi oleh IASC pada tingkatan internasional tidak memiliki kantor operasional dilapangan –penyajian mereka, jika saja, melalui pemilihan khusus oleh anggota perwakilan. Suatu keluhan dari koordinator senior adalah bahwa INGO tidak konsisten terhadap persetujuan umum pada isu-isu penting yang sedang dibahas,

sebagian besar dikarenakan anggota NGO masyarakat tidaklah setuju mengenai siapa yang mempunyai hak untuk berbicara pada mereka.

Pada langkah awal keadaan darurat, tidak ada jasa layanan umum untuk penilaian umum. Di semua negara-negara, kepentingan relative diberikan kepada penilaian dan aturan koordinasi dari UNDAC, sebagai contoh, harusnya telah dibuat dengan lebih jelas. Dampak dari tsunami, yaitu pengaturan suatu tempat transaksi cek bank informasi (HIC) dan suatu platform umum untuk inter-koordinasi sector barangkali lebih penting dibanding penilaian itu sendiri.

Dalam evaluasi ditemukan ketidakcukupan usaha untuk menyebarkan informasi dan menjelaskan tujuan pelayanan umum yang disediakan oleh UN, bagaimana mereka dapat menghubungkan dengan kapasitas yang ada, dan bagaimana mereka mungkin lebih siap bereaksi terhadap persyaratan dari agensi/perwakilan tersebut. Mitra kerja boleh, sebagai contoh, mendapatkan keuntungan dari persetujuan umum atas pengadaan perbekalan, pengaturan sewa sebagai tambahan terhadap jasa yang telah tersedia.

Dalam evaluasi juga ditemukan ketidakpuasan terhadap kualitas rapat-rapat koordinasi terutama selama enam bulan pertama dari tanggapan itu. Peraturannya, tanggung-jawab dan kekuasaan untuk mengambil keputusan- tidak sering ditunjukkan oleh peserta, mengungat terkadang adanya campuran yang tidak produktif mengenai penyampaian informasi dan pengambilan keputusan. Jarang sekali adanya pengawasan atau evaluasi terhadap rapat-rapat yang diadakan. kesempatan biaya kehadiran, terutama terhadap agensi yang lebih kecil, lebih berat daripada keuntungan, terutama ketika tema dan keputusan rapat di ulang beberapa kali.

Arus pengunjung yang memaksakan suatu beban pada otoritas lokal, kekuatan militer dan staf perwakilan. Dalam beberapa kasus, kedatangan pengunjung berprofil tinggi memenuhi kebutuhan logistic staf dalam jangka waktu sampai dua minggu dan jadwal logistic harus diutamakan untuk menampung pengunjung. pengevaluasian ini menyatakan bahwa kesetiaan ke pelaporan yang umum dan misi yang hubungkan akan dilaporkan dalam beberapa cara ke arah isu yang mendesak ini. Tantangan yang utama, bagaimanapun, berpusat pada dari personil, kecakapan mereka yang tinggi dan, terutama pada tingkat pemerintahan, tingkatan yang tidak cukup dan resourcing tidak cukup tentang senioritas, yang mengutamakan kepercayaan dan confidence.

## KEKUASAAN POLITIK DAERAH ASAL

Usaha pembebasan bergantung pada pemerintahan nasional yang kuat dengan perkembangan intitusi yang berfungsi sebagai kerangka undang-undang yang sah. Bagaimanapun, suatu pemerintahan nasional yang kuat tidak bisa mengganti kerugian untuk mengembangkan mekanisme koordinasi pemerintahan lokal yang kurang baik. Evaluasi menemukan bahwa, pada semua negara-negara, kemampuan pemerintah untuk mengkoordinir secara efektif telah dibatasi oleh kapasitas dan pengaksesan informasi. Awal penutupan struktur koordinasi yang khusus (untuk suatu maksud) (CNO di Sri Lanka, sebagai contoh) di tahap yang keadaan darurat dan penerusan dari garis yang reguler- tanggung-jawab kementerian mengurangi efektivitas koordinasi, meskipun di Indonesia BRR telah terbukti lebih efektif.

Kapasitas operasional optimal dari UN dan INGO telah dicapai pada waktu yang sama ketika ketrampilan transfer dan kapasitas dibangun untuk koordinasi dan usaha kesembuhan merupakan hal yang paling diperlukan oleh kesatuan pemerintah, namun tidak ada korelasi antara angka-angka ditempat itu dan usaha akan harapan tersebut.

Peran yang sangat penting dimainkan oleh OCHA dalam memastikan konsistensi dan kohesi antara pemerintah dan mitra internasional pada daerah dan sub- tingkatan yang dihambat oleh singkatnya waktu, dan pembiayaan dari pos-pos tertentu. Di Sri Lanka, peran penting ini telah disepakati dengan kurangnya dukungan negara-negara anggota Un di ibukota (walaupun ini sudah berubah). Ini juga dirusak oleh penyebaran junior dilapangan dan buruknya sumber penghasilan lokal.

## DIVISI FUNGSIONAL TENAGA KERJA

Evaluasi ini menemukan adanya pergantian yang sering dari koordinator UN yang senior yang mengurangi kesinambungan dan kepercayaan yang palsu dibelakang koordinasi dan kepemimpinan yang efektif. Lebih dari itu, mutu dari individu ditetapkan dengan sangat bervariasi, menandakan kebutuhan akan pelatihan yang lebih baik, dengan penekanan yang lebih besar diberikan untuk mencapai target keterampilan yang membahayakan pendekatan umum UN-centric terhadap koordinasi.

Beberapa responden mempertanyakan perlunya kepemimpinan strategis yang ditunjuk oleh UN senior, maupun perwakilan yang diperlukan. Kemudian, di bawah peningkatan kepemilikan pemerintah dari nasional dan proses pemulihan provinsi,

perbandingan keuntungan dari UN haruslah berada dalam perencanaan strategis. Kebijakan dan koordinasi, dibandingkan pengarah penerapan proyek secara langsung. Beberapa kunci INGO merasa kecewa atas sikap asumsi kepemimpinan UN yang diterjemahkan secara kaku terhadap metode dan praktek. Dengan diberikannya perbandingan yang ditunjukkan oleh beberapa NGO, tidak ada alasan pasti mengapa perwakilan-perwakilan UN mengambil alih kawasan koordinasi.

Pos bencana banjir INGO menciptakan suatu ruang bagi kemanusiaan dengan dana yang lebih dari cukup. Beberapa anggota INGO lebih suka untuk menyimpan informasi sebagai suatu poin penting bagi populasi klien, dan untuk menggunakan pertemuan-pertemuan koordinasi sebagai alat penyiaran yang eksklusif. Lebih dari itu, banyak orang memperlebar perintah mereka diluar area dari kemampuan tradisional dan membuat perjanjian pada bulan berikutnya harus ditarik kembali.

Perubahan tiba-tiba dari Palang Merah kecil menjadi Palang Merah Internasional disetiap negara menghasilkan permasalahan koordinasi yang tidak terduga. Sumbangan barang dan jasa dari masyarakat sering ditentukan oleh asumsi domestik dari mereka sendiri akan pengambil-alihan kebutuhan dengan sedikit anggapan untuk meminta nasehat dari negara-negara tuan rumah yang memiliki masyarakat tetap. Bagaimanapun, hal ini tidak mengurangi peran penting yang dimainkan oleh anggota pergerakan dalam pertolongan dan pemulihan pada seluruh negara. Permasalahan koordinasi harus beberapa tingkat dialamatkan melalui pergerakan kerangka koordinasi, yang dikembangkan dari Januari-Februari dan diadakan dalam bulan Maret 2005

Ada banyak laporan vertikal yang diserahkan kepada para penggalang dana atau markas-markas besar atas biaya koordinasi 'cabang' disekitar penggunaan sumber daya secara efektif dan perencanaan strategis didalam dan diluar sektor. Ada cukup banyak pengulangan dan duplikasi/pemalsuan didalam laporan. Banyak perwakilan melaporkan penekanan untuk mempercepat penyampaian dari media dan pemilihan penggalang dana itu sendiri. Meskipundemikian, evaluasi menemukan hal ini lebih masuk akal daripada empiris.

Koordinasi antar NGO sangat bervariasi. Di Aceh, pertemuan-pertemuan rutin antara jawatan INGO dapat dihadiri hanya oleh 6 atau 7 perwakilan-perwakilan besar, tetapi dalam kaitannya dengan pemenuhan sumber daya sebanyak 65%, dari penerapan proyek dilapangan. Beban dari buruknya koordinasi antar NGO biasanya

disebabkan oleh penyajian yang lemah. Pembagian informasi dan kepatuhan terhadap standar umum – berkisar sekitar 35%.

Dalam beberapa hal, pengarah implementasi telah lebih disukai karena memakan waktu mendekati yang melibatkan persekutuan bangunan dan pelatihan dengan NGO dan CBO lokal. Walaupun tantangan dari kapasitas bangunan adalah di luar lingkup dari studi ini dan mencakup secara ekstensif di TEC (Kapasitas Belajar) evaluasi ini menemukan bahwa suatu konsekuensi dari kapasitas rawa lokal oleh campur tangan internasional yang besar di Aceh dan Sri Lanka merupakan penyajian yang buruk dari, dan konsultasi dengan, NGO dan CBO lokal di dalam pertemuan-pertemuan koordinasi. Hal ini mungkin telah mendorong erosi dari kapasitas keadaan darurat lokal.

Evaluasi menemukan beberapa bukti dari staff 'penebusan' dari NGO lokal oleh lembaga internasional, terutama sekali sepanjang tahap pembebasan. Dan juga, di mana pertemuan-pertemuan koordinasi dikuasai oleh lembaga internasional, Bahasa Inggris menjadi medium dari komunikasi atas biaya yang relatif di potong oleh peserta lokal, baik dia merupakan NGO yang mandiri, maupun pejabat atau bahkan staff INGO yang lokal.

Tanggung-jawab kepada pengaruh populasi adalah suatu batu penjur dari praktek koordinasi yang baik. Gabungan perwakilan komunikasi yang efektif dengan populasi klien, mencakup suatu keluhan memeriksa prosedur dan hal-hal rutin terbaru dalam proses pemulihan, bukanlah suatu awal prioritas. Hal ini dapat mengakibatkan frustrasi dan salah paham. Komunikasi dan konsultasi antar masyarakat internasional dan orang-orang yang terpengaruh adalah tidak teratur dan sporadis.

Evaluasi menguji hubungan antara sipil- militer beberapa detil. Militer memiliki fungsi yang tidak ternilai pada situasi tahap yang akut saat keadaan darurat, tetapi tidak semua militer yang tersebar memiliki tugas penting dalam pembebasan. Tidak ada organisasi yang mewakili masyarakat yang berperikemanusiaan untuk menyediakan suatu gambar-an yang padu tentang kebutuhan semua negara-negara yang terpengaruh dalam rangka menasehati angkatan perang militer yang dilibatkan mengenai tanggapan tentang disposisi paling menguntungkan dan kegunaan dari asset mereka. IASC 'Petunjuk Oslo' untuk penggunaan militer dan asset pertahanan sipil di dalam pembebasan bencana telah ditemukan supaya tidak dikenal secara luas atau digunakan oleh kementerian nasional yang bertanggung jawab untuk bantuan

bencana, maupun oleh angkatan perang militer atau masyarakat yang berperikemanusiaan.

## PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK PEMULIHAN

Koordinasi usaha di tahun pertama terhadap tsunami telah hampir membatasi ukuran perolehan aktivitas, dibandingkan suatu prioritas yang strategis tentang hasil, atau perolehan suatu konsensus atas tujuan-tujuan tertentu. Evaluasi menemukan suatu penekanan yang berat atas penggantian asset, dengan memberikan relatif lebih sedikit perhatian kehidupan sekitar. Kelangkaan data dipisahkannya, khususnya berdasarkan jenis kelamin, efektif lebih lemah mengarahkan dari kelompok yang peka dan memperkuat praktek yang bersifat membedakan.

Terutama di Indonesia, evaluasi yang ditemukan tanpa adanya suatu tinjauan kemasa depan dan pemikiran yang strategis pada pihak masyarakat internasional berkenaan dengan ketetapan tempat perlindungan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan penempatan suatu solusi sementara pada tempatnya. Lebih dari itu, dengan perhatian yang tidak sebanding diberikan kepada perubahan yang permanen, persyaratan yang utama bantuan bagi mereka yang hunian dan yang temporer telah diabaikan sampai hal tersebut menjadi suatu 'krisis'.

Ada sedikit bukti di bulan pertama baik dari arah maupun manajemen berkenaan dengan alokasi sumber daya cross-sectoral yang berhubungan satu sama lain. Berdasarkan letak geografis, seperti halnya secara sektor, pembagian kerja dengan seseorang yang ditugaskan agen merupakan petunjuk yang bertanggung jawab untuk yang multi-sectoral mengenai pendekatan di dalam area, mengkombinasikan dengan para agen yang sector-specific- bisa jadi lebih disukai model. Hal ini tentu saja diumumkan secara resmi oleh RC/HC di Jakarta, sebagai contoh, tetapi tidak memungut. Konsekwensinya adalah disproporsionalitas dalam jangkauan pemenuhan dan alokasi yang geografis.

Tanggapan terhadap tsunami kurang konsisten, terukur dan analisa jenis kelamin yang dikoordinir, suatu penghilangan yang telah muncul dalam beberapa keganjilan perlindungan yang serius, yang merupakan suatu arah dari struktur pengambilan keputusan yang didominasi oleh pria yang sebagian besar sudah tidak tertandingi. Khususnya, data pemisahan jenis kelamin mendasarkan program acara yang ditargetkan dimana kedua-duanya sebagian besar hilang dalam pembebasan dan tahap penyembuhan.

Pemerintahan didesak terus untuk memberikan sumber daya dan perhatian yang lebih besar kepada koordinasi masyarakat internasional, dan sebagai jumlah yang banyak dari proyek tunggal jangka pendek NGO, kemudian koordinasi mengalami peningkatan pada pertengahan akhir tahun 2005. Susunan kepegawaian dalam lembaga internasional menjadi rutinatas, dengan istilah kontrak yang lebih panjang. Mekanisme perkerjaan mengikuti jalan dana yang baru (DAD) dan konsolidasi dari mekanisme yang ada (FTS) yang dimaksud gap itu dalam bantuan bisa mulai untuk dilihat dengan jelas, meskipun demikian bukannya tidak mungkin peralatan ini memperkenalkan suatu gambar-an yang menyeluruh. Di Indonesia dan Maldives, hal ini terjadi bersamaan dengan perwujudan dari komitmen pemerintah yang budgeter yang lebih besar. Awal kerusakan dan penilaian kerugian yang dikerjakan oleh lembaga keuangan internasional (IFIS), dan berikut pengenalan tentang dana perwalian, mendorong koordinasi penggalang dana yang lebih besar di periode kesembuhan, meskipun demikian merancang pembiayaan melalui Multi-Dana Perwalian Penderma (MDTF) di Indonesia relatif lebih kecil.

#### MOBILIASI SUMBER DAYA UNTUK PROGRAM BERSAMA

Proyek periode pembelanjaan enam bulan dari program Flash Appeal (Seruan Singkat) adalah tak realistis; di sini, seperti dalam beberapa keadaan darurat sebelumnya, periode pemulihan dan rekonstruksi yang dihitung harusnya lebih panjang. Karena banyaknya para agen, ada suatu alokasi yang berlaku surut tentang dana ke arah program acara kesembuhan yang lebih panjang, tetapi ini bukanlah tunduk kepada dikoordinir diskusi kebijakan antar jawatan, yang didukung dan membantah pada suatu platform kebijakan yang umum. Ada pengecualian-pengecualian: IFRC, sebagai contoh, memperkenalkan suatu persiapan lima- program acara pemulihan di bulan pertama; dan di Sri Lanka dan Aceh merupakan suatu strategi awal UN yang transisi menjadi suatu provinsional platform peningkatan untuk koordinasi para agen yang sudah termasuk dalam program Flash Appeal (Seruan Singkat). Yang belakangan, tidaklah dipakai dalam setiap acara.

Dalam mempromosikan dana perwalian, IFIS sudah tingkatkan koordinasi penggalang dana melalui penyatuan sumber daya, selagi rekonstruksi mengabdikan 'anggaran terpasang' nasional sebagai prioritas perencanaan. Yang paling penting, dana perwalian mendorong dialog kebijakan yang strategis antara penggalang dana

dan pemerintah. Gabungan dari pendonor kepada MDTF di Indonesia, sebagai contoh, keuntungan dari terciptanya hubungan Bank Dunia dengan pemerintah mendorong maju dialog atas penguasaan dan beningnya yang menjadi suatu pilar pusat dari BRR. Penyebaran yang lambat, bagaimanapun, mempunyai efektivitas yang lemah.

Sisa suatu pilihan yang gigih antar penderma untuk menyoroti distribusi individu mereka sendiri, dan banyak para agen yang membelanjakan biaya operasioanal secara disproportional sejumlah penulisan waktu melaporkan untuk penderma atas sumbangan bantuan secara individu. Sekalipun berbagai kesulitan yang dihadapi sekarang, dalam menerapkan prinsip, tak dapat dikurangi- kontribusi yang diperuntukkan, yang ditarungkan oleh alokasi dan pelaporan untuk memperkuat apa yang ditugaskan agen pantas menerima pendekatan secara keseluruhan, adalah suatu ideal bahwa penilai akan menegakkan. bagaimanapun, usaha yang lebih besar diperlukan ( terutama sekali dalam laporan-laporan UN) untuk dipindahkan di luar laporan umum dari capaian program acara dan menyediakan detil yang cukup untuk mencukupi monitoring persyaratan dari penderma.

## MANAJEMEN INFORMASI

Telpon dan satelit sebagai instrumen yang penting dalam komunikasi dan koordinasi langkah-langkah yang segera pada saat keadaan darurat. Sejak teknologi banyak berada pada sektor swasta, usaha yang lebih besar diperlukan untuk mengembangkan kerjasama antara kelompok internasional dan lokal untuk meningkatkan mutu dari informasi dan kecepatan penyampaiannya. Sebagai contoh, suatu sistem peringatan dini- menggunakan teknologi baru dan mencakup sistem yang didasarkan oleh masyarakat- telah mempunyai suatu dampak pada bidang tersebut. Isu dari analisa data- bagaimana cara menambahkan nilai bagi suatu data yang sering berlawanan- yang mengacaukan HICS sejak dari permulaan. HIC menciptakan permintaan bersifat eksponen sendiri, namun manusia yang dilatihnya- sumber daya berdasarkan toolkit/templates untuk penyebaran yang cepat telah dibatasi. Banyak para agen utama tidak menggunakan jasa sama sekali pada dua bulan pertama, sumber informasi mereka sendiri, informal dan formal, diharapkan lebih baik.

Hasil Evaluasi ditemukan bahwa HIC bukanlah suatu alat yang secara penuh dapat diakses kepada pemerintahan. Karena perpindahan yang akhirnya ke pemerintahan, strategi jalan keluar pada setiap negeri perlu meliputi pertalian kepada Pengembangan tersebut database bantuan (DAD) dan lain informasi- program acara manajemen di bawah payung tunggal mengkombinasikan dengan, sebagai contoh, Kapasitas UNDP Yang membangun Program acara.

Selagi kapasitas yang memetakan latihan dan agen acuan mempunyai beberapa nilai, ada sedang mengurangi kembalian dan dalam- pemborosan yang dibangun untuk mencoba menangkap aktivitas keseluruhan masyarakat berperikemanusiaan. Puncak 10- 15 para agen yang pada umumnya menghadirkan sekitar 80 persen aktivitas dan membiayai, semua yang perlu untuk secara penuh dicerminkan di dalam pemetaan latihan manapun

#### MEMASTIKAN UKURAN/NILAI TANGGUNG JAWAB

Mengomentari korupsi bukanlah acuan dari evaluasi ini. Bagaimanapun, regu mencatat suatu yang ditingkatkan tingkat barang dan kapasitas dipertinggi dalam level internasional dan nasional ( termasuk bukan- bidang pemerintah) mengenai monitoring transaksi tsunami. Di ndonesia, hal ini sedang memberi harapan bahwa BRR telah memberi prioritas tinggi ke dalam semangat ini.

Resiko korupsi telah meningkat dengan kekurangan dalam keuangan yang ada dan sistem administrasi dari negara-negara terpengaruh. Sistem perkerjaan mengikuti jalan baru saja diperkenalkan khususnya DAD- membuatnya gampang untuk pemerintah dan negara-negara penderma untuk memeriksa apakah dana digunakan sebagaimana yang diharapkan. Evaluasi menemukan bahwa walaupun data dari DAD masih masuk, suatu tertentu ' daya gerak' telah dibentuk dalam kaitan dengan keduanya kooperasi dan permintaan tegas pemerintah dari menyokong para agen, dan minat para agen untuk dilihat di depan umum dapat dipertanggungjawabkan.

#### ADVOKASI GABUNGAN

Evaluasi menemukan bahwa dalam enam bulan pertama khususnya, kebanyakan para agen menyetorkan ke rekening perhatian cukup bagi pengembangan dialogue dengan pemerintah dan masyarakat mengenai perang/populasi non-peperangan dan isu perlindungan yang dihubungkan Indonesia, Konsolidasi Populasi ( Maldives) dan pre-/post- populasi tsunami (Sri Lanka). Beberapa responden

mengusulkan bahwa dialogue yang terbatas pada sebagian dalam kaitannya dengan diri- pembatasan yang dikenakan oleh para agen dengan uang proyek.

Pengevaluasi dapat menerima itu, di Aceh sebagai contoh, prioritas sudah pada tempatnya diberikan kepada bangunan dimana suatu hubungan menanggung pemerintah itu- dan pemerintah sendiri memulai pembicaraan kemungkinan tentang bantuan internasional di luar tsunami-yang dipengaruhi populasi. Ini juga menerima perhatian itu harus dicoba-coba dalam mencari-cari partnerships dengan beberapa-organisasi yang mencari-cari pembiayaan untuk operasi pembebasan di luar kemampuan mereka. Bagaimanapun, kepentingan tentang uang proyek dilakukan untuk pembebasan /pemulihan mungkin telah menyajikan suatu perbedaan untuk terlibat dalam pekerjaan pembelaan.

Suatu kerangka kebijakan umum dikoordinir untuk hak azasi manusia adalah yang hilang, seperti suatu platform umum untuk perlindungan kelompok minoritas dan kelompok yang tak bersuara seperti wanita-wanita.

Dalam semangat ini, beberapa responden menunjukkan bahwa divisi tanggung-jawab antara UN Penduduk dan Koordinator Berperikemanusiaan tidaklah selalu bersih, menikmati implikasi untuk (a) mewakili bantuan masyarakat secara keseluruhan, dan (b) menjadi garis terdepan pembelaan sulit dan sering juga isu politis.

## GABUNGAN REKOMENDASI DAN TINDAKAN

1. Suatu tinjauan ulang internal konsultasi harus dikerjakan dengan INGO dan NGO lokal untuk mengembangkan pendekatan baru menuju keberhasilan: ( a) penyajian yang cukup di dalam struktur koordinasi pada semua tingkat; (b) konsensus yang dapat diterjemahkan ke dalam posisi umum dan suatu tingkatan kemungkinan ramalan atas hal-hal penting; dan (c) suatu proses sertifikasi dapat diperkenalkan untuk membantu pemerintah dan penderma di dalam memilih NGO yang bertanggung jawab dengan siapa yang untuk bekerja. (tindakan: IASC, NGO perjanjian kerja sama temporer dan penderma).
2. Dalam bencana alam seperti halnya keadaan darurat kompleks, RC/HC bersama dengan NGO/RED Cross umum, perlu mengambil suatu langkah-awal dalam mempromosikan pembelaan hubungan 'sulit' seperti daratan kepemilikan tanah,

pengaruh/non pengaruh populasi, akses pada perang- populasi yang terpengaruh dan meningkatkan penguasaan. ( tindakan: IASC, semua para agen, RC/HC).

3. Masyarakat internasional perlu memastikan bahwa prioritas cukup diberikan kepada tingkatkan kapasitas koordinasi lokal seperti halnya badan pemerintah nasional. Ini akan meliputi, sebagai contoh, penyebaran staff senior di luar ibukota dan membantu untuk membangun kapasitas otoritas lokal untuk menggunakan sistim informasi seperti HIC. Di sejumlah besar INGO diantisipasi, penyebaran suatu NGO senior perwira penghubung harus dipertimbangkan.( Tindakan: OCHA dan semua para agen).
4. Efektif, konsisten dan mengkoordinir komunikasi dengan penerima populasi pada semua langkah tanggapan- dan dengan suatu usaha direncanakan wanita-wanita termasuk dalam di dalam dialogue- harus diprioritaskan. Hal ini memerlukan peralatan dan sumber daya staff, dengan usaha ke arah mencapai suatu protokol komunikasi dengan pemerintah tuan rumah. Suatu strategi umum harus dikembangkan, mencakup penggunaan pertemuan-pertemuan publik, menyiarkan media, laporan berkala dan poster. ( Tindakan: semua para agen dan OCHA).
5. Penciptaan dan penggunaan suatu database penerima uang umum, yang disajikan dan dikuasakan oleh suatu badan pemerintah pusat, harus suatu awal prioritas dalam tahap darurat. ( Tindakan: semua para agen, dengan pemerintah tuan rumah).
6. Berkenaan dengan arus kunjungan yang tetap oleh staff agensi dan penderma, IASC sangat perlu memonitor petunjuk yang menuntut semua para agen dan penderma untuk melaporkan atas banyaknya ongkos mengunjungi pendelegasian. pelaporan umum di bawah bimbingan GHD, sebagai contoh, harus digunakan. (Tindakan: semua para agen dan IASC).
7. Kepemimpinan dan koordinasi ketrampilan. Dasar bagaimana cara memaksimalkan keluaran pertemuan-pertemuan. Ketrampilan ini harus dipromosikan oleh semua para agen, membentuk bagian dari latihan induksi untuk staff operasional, bersama dengan prosedur operasi baku.( Tindakan: semua para agen dan OCHA).

8. Benchmark ( jenis kelamin- sensitip) indikator untuk koordinasi harus berkembang, bersama dengan monitoring sederhana dan laporan- sistem punggung untuk mutu pertemuan-pertemuan koordinasi.( tindakan: OCHA dan semua para agen)
9. Dalam keadaan darurat ini penting, kantor RC/HC kantor harus didukung oleh penyebaran awal petugas siapa yang tinggal di dalam pos untuk sedikitnya satu tahun untuk bertindak sebagai seorang sumber daya untuk masyarakat yang berperikemanusiaan sebebannya dan untuk mendukung tendensi isu jenis kelamin di seluruh sektor program ( Tindakan: RC/HC dan semua para agen).
10. Sejalan dengan petunjuk UN yang dikeluarkan pada bulan Mei 2006 atas penerimaan penawaran para ahli, OCHA perlu petunjuk atas nama masyarakat yang berperikemanusiaan lebih luas dalam mengembangkan bimbingan atas donasi sektor swasta. Pada awalnya, suatu kebijakan yang internal harus bersama dengan semua OCHA staff dan perlu meliputi posisi MOU untuk penawaran bono ahli. OCHA perlu juga memastikan bahwa semua keadaan darurat utama mempunyai suatu titik untuk bertindak sebagai penghubung pribadi dengan perusahaan utama ( idealnya baik dalam negeri dan pada OCHA HQ). ( tindakan: OCHA dan IASC).
11. Untuk menghindari pergantian yang tinggi tentang staff, HR departemen perlu mencoba untuk menyebar jangka panjang ( sedikitnya satu tahun) personil di bidang secepat mungkin. Perhatian yang mendesak harus diberikan kepada kecepatan mengorganisir anggota direkrut, dan perkembangan pencatatan dari posisi yang yang pantas- dengan staff. ( tindakan: adalah semua para agen)
12. Sipil- koordinasi militer harus ditingkatkan melalui promosi yang lebih luas tentang petunjuk, prinsip dan prosedur. Yang ditingkatkan di dalam- rumah dan advokasi dan pelatihan eksternal, seperti halnya pelatihan gabungan antara para agen yang berperikemanusiaan dan militer, akan meningkatkan sipil- militer dan hubungan militer dengan militer. Para pelaku kemanusiaan senior- khususnya kantor RC/HC - harus dibuat lebih sadar akan sipil- sumber daya militer tersedia untuk mereka dan kontribusi potensial yang dapat mereka tunjukkan, mencakup

penyebaran yang cepat jika sipil- tenaga ahli militer. ( tindakan: ERC, IASC, dan semua para agen)

13. RC/HC perlu betul-betul mendukung dan menyampaikan informasi dengan jasa umum yang tersedia pada semua para pelaku: apa yang mereka sediakan, bagaimana para agen yang bukan UN mendapatkan kapasitas suplement, dan tujuan 'acuan' Jasa Kemanusiaan Umum. ( tindakan: RC/HC).

14. Sumber daya yang cukup untuk koordinasi harus dipastikan sampai pembebasan, transisi dan tahap kesembuhan dari bencana. ini meliputi pendukung jasa yang umum dari NGO dan Pergerakan Palang Merah. Penekanan harus diberikan kepada pendukung RC/HC melalui transisi, dengan tak mengindahkan keanggotaan kelembagaan dan penafsiran yang bersifat membatasi dari mengamanatkan mengenai pembebasan, kesembuhan atau pengembangan. ( tindakan: adalah semua para agen, ERC dan IASC).